**Mata Kuliah : Analisa Politik Luar Negeri**

**Dosen : Andrias Darmayadi, Ph.D**

**LANGKAH-LANGKAH EVALUASI POLUGRI**

1. Kita mesti mengungkapkan suatu deskripsi/uraian yang mencakup mulai dari tantangan, hambatan ataupun peluang yang dihadapi oleh suatu negara dalam melaksanakan politik luar negerinya;
2. Kita harus berupaya untuk memikirkan/menafsirkan arus informasi dan intelegensi yang mempengaruhi format/bentuk serta persepsi dari para penentu kebijakan dalam urusan dalam negeri;
3. Kita mesti juga bisa mengungkapkan dan menyelidiki problematika sebagai berikut: lembaga/aparat pemerintahan yang manakah yang paling bertanggung jawab dalam pengelolaan dan penyelesaian berbagai hambatan dalam urusan luar negeri dan lembaga/aparat mana pula yang bertanggung jawab apabila upaya pihak pertama menemui kegagalan. Dalam hal ini kita juga harus bisa melihat apakah permasalahan tadi bisa di selesaikan/dipecahkan secara intersection (lembaga) atau mungkin juga dengan bantuan lembaga non-pemerintah bahkan LSM;
4. Kita juga harus bisa mengungkapkan suatu deskripsi yang jelas dari hasil akhir serta juga mengenal hasil akhir/dampak dari suatu kebijakan/pengaruh yang terjadi akibat dari kebijaksanaan. Selain itu, kita harus bisa melihat berbagai penyimpangan/kontradiksi di lapangan/dalam pelaksanaan yang berlainan dengan apa yang sudah di gariskan;
5. Kita juga harus bisa menandai pilihan sikap/tindakan yang secara umum senantiasa di pilih oleh suatu negara. Kita juga harus bisa melihat serta mengkaji bentuk/sifat dan karakteristik penyelesaian yang di jalankan oleh suatu negara dalam menghadapi situasi tertentu dan pada masa/saat tertentu.

**POLUGRI RI: PERLU KEBIJAKAN YANG INTEGRATIF**

Kondisi global yang berubah cepat mengharuskan setiap negara merumuskan kembali arah politik luar negerinya. Sejauh ini, selama 60 tahun merdeka, proses penyusunan dan pelaksanaan polugri RI lebih dibebankan kepada Deplu.

Penyusunan kebijakan luar negeri tidak bisa dilakukan hanya oleh Departemen Luar Negeri, begitupula dalam pelaksanaannya. Penyusunan maupun pelaksanaan kebijakan politik luar negeri harus dilakukan terintegrasi oleh seluruh elemen bangsa.

Pandangan bahwa politik luar negeri bukanlah unsur yang berdiri sendiri disampaikan oleh Rizal Sukma, Emil Salim, Hadi Soesastro, S. Wiryono dan Ali Alatas, dalam Seminar “Desain Baru Politik Luar Negeri RI” yang diselenggarakan CSIS.

Seiring dengan tuntutan perubahan, prinsip bebas aktif dalam polugri RI perlu dielaborasi pada tingkat teknis pelaksanaan sesuai dengan tuntutan kondisi perkembangan global.

Sungguh beralasan pula jika partisipasi seluruh elemen bangsa sangat ditekankan dalam penyusunan dan pelaksanaan politik luar negeri dan diplomasi, terutama karena cakupan urusan politik luar negeri bertambah.

Bahkan, sesuai dengan kebutuhan, diplomasi dalam bidang ekonomi dan investasi seharusnya menjadi ujung tombak. Orientasi politik luar negeri perlu diarahkan untuk menemukan peluang ekonomi dan kepentingan investasi.

Saat ini, masih terkesan kuat penyusunan kebijakan politik luar negeri itu dilakukan tidak terintegrasi. Dalam pelaksanaannyapun lebih banyak dibebankan kepada Dep. Luar Negeri. Akibatnya, dalam soal-soal ekonomi dan investasi, polugri Indonesia kurang berperan.

Dalam setiap persoalan, kesimpulan akhirnya adalah tidak banyak yang bisa dilakukan oleh Deplu/Menlu karena masalahnya ada pada orang lain semua. Jadi, ada masalah itu. Ini karena kita terlanjur mendekati masalah-masalah secara sektoral.

Menurut Hadi Soesastro, Mesin Diplomasi itu juga harus antisipatif dan bukan reaktif. Inisiatif-inisiatif yang kita buat di bidang ekonomi semuanya reaktif, contohnya Perundingan Perjanjian Perdagangan Indonesia dengan Jepang.

Menurut Rizal Sukma, elemen politik luar negeri baru RI harus progresif, jangan konservatif. Hubungan bilateral yang manfaatnya lebih jelas harus lebih di tingkatkan. Agenda politik luar negeri untuk jangka pendek, dua saja, yaitu:

* Pertama, bagaimana membantu dunia internasional memahami Indonesia;
* Kedua, bagaimana mengeksplorasi sumber-sumber daya internasional untuk kebutuhan-kebutuhan didalam negeri.

Dalam pandangan Emil Salim, Polugri RI yang bebas aktif tidak berarti kita tidak berani bersikap. Dalam abad ke-21 dan sesuai dengan Mukadimah UUD’45, dalam menjalankan polugrinya, RI harus berani berpihak pada masalah-masalah yang tak kenal batas negara, seperti HAM, Lingkungan, Gender dan Kemiskinan.

Emil mengingatkan, kebijakan polugri merupakan refleksi perkembangan politik dalam negeri, juga mendorong perkembangan politik dalam negeri. Oleh karenanya DEPLU punya tanggungjawab untuk menggerakkan politik dalam negeri.

Kinerja polugri akan kedodoran jika kondisi dalam negeri kacau. Kegagalan membenahi kondisi dalam negeri akan mempengaruhi citra di tingkat global. Dalam dunia yang semakin terbuka, hampir pasti tidak ada lagi persoalan yang mudah disembunyikan.

Pelaksanaan polugri bebas aktif selama ini, pelaksanaannya sangat pragmatis sesuai dengan selera Presiden. Presiden Soekarno yang sangat getol dengan kemerdekaan, bebas aktifnya berarti anti Blok-Barat. Ketika Pemerintahan Presiden Soeharto bebas aktif berarti pro-Barat.

Pilihan polugri RI sekarang ini untuk lebih dominan ke Asia sangat valid. Oleh karena pembangunan pada abad ke-21 akan didominasi oleh Asia. Oleh karena itu Asia harus menjadi fokus strategi kita dan perlu lebih akrab, terutama dengan China dan India.

Perubahan persepsi ruang dan waktu akibat globalisasi telah melahirkan pemahaman baru dunia tentang Indonesia, dan sebaliknya pemahaman baru Indonesia tentang dunia.

Bangsa Indonesia harus pandai-pandai menempatkan diri dan menentukan peran ditengah dunia yang terus berubah, bahkan dilukiskan sedang berlari tunggang langgang. Indonesia akan ketinggalan jauh di belakang jika tidak bergegas mengejar perbaikan dan perubahan.